

# BAB I

## PENDAHULUAN

### I.1 Latar Belakang

Pelaksanaan otonomi daerah merupakan proses yang memerlukan keterlibatan lapisan masyarakat, dan juga memberikan wewenang untuk Pemerintah Daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah sehingga peran pemerintah adalah sebagai fasilitator karena Pemerintah lebih mengetahui sasaran dan tujuan pembangunan yang akan dicapai.

Perjalanan panjang dalam penerapan akuntansi pemerintahan di Indonesia tidak bisa lepas dari perkembangan sosial politik dan pemerintahan di Indonesia. Perubahan sistem politik dan pemerintahan tersebut berdampak pada perubahan aturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan keuangan negara. Pemerintah, dalam kurun waktu yang relatif singkat, telah melewati serangkaian proses reformasi sektor publik, khususnya melakukan reformasi di bidang keuangan negara, perubahan yang signifikan adalah perubahan di bidang akuntansi pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Salah satu kunci penting dalam pengelolaan keuangan negara tersebut adalah terkait dengan sistem akuntansi pemerintahan Indonesia yaitu dengan melakukan pengembangan kebijakan akuntansi pemerintah berupa standar akuntansi pemerintahan (SAP) yang bertujuan untuk memberikan pedoman pokok dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Perubahan yang sangat mendasar dalam Standar Akuntansi Pemerintahan yang baru (2010) dibandingkan dengan SAP (2005) adalah diterapkannya SAP *full accrual basis* yakni mengakui pendapatan, beban, aset, utang dan ekuitas dalam pelaporan. Mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam hal

ini merupakan bagian dari pemerintah yang melaksanakan fungsi dalam menyusun laporan keuangan, oleh karena itu setiap SKPD harus menyusun laporan keuangan sebaik mungkin.

Pemerintah, melalui implementasi standar akuntansi berbasis akrual, dituntut dapat menyajikan kualitas laporan keuangan yang baik dan bermanfaat untuk mengetahui efisiensi dan efektifitas pelayanan publik yang disediakan, manajemen dan pengendalian aset negara, perencanaan, penyusunan program dan anggaran. Informasi keuangan sektor publik yang berkualitas akan mengurangi kesenjangan informasi antara pemerintah dengan masyarakat dan stakeholder lain atas penggunaan dan alokasi keuangan negara. Standar akuntansi berbasis akrual diharapkan dapat meningkatkan relevansi, ketepatan waktu, kelengkapan dan laporan keuangan pemerintah sebagai bagian dari upaya peningkatan tata kelola sektor publik yang lebih baik.

Dengan diberlakukannya Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Pada Pasal 36 UU No. 17 Tahun 2003 Pemerintah Indonesia diharuskan untuk melaksanakan pengelolaan keuangan berbasis akrual selambat-lambatnya lima tahun setelah peraturan tersebut ditetapkan yang artinya Pemerintah Indonesia harus sudah melaksanakan pengelolaan keuangan basis akrual di tahun 2008. Kenyataannya hingga saat ini pemerintah masih belum melaksanakannya.

Pada tahun 2010 pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 yang mengatur tentang penggunaan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual. Pemerintah merencanakan bahwa SAP akrual selambat-lambatnya harus dilaksanakan pada tahun 2015 ini. Dengan itu, pemerintah diharuskan dapat mulai menyiapkan sumber daya manusia (SDM), sarana prasarana, sistem informasi, dan juga komitmen organisasi dan integritas yang tinggi untuk pelaksanaannya. pemerintah daerah wajib mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual pada 2015 ini sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang SAP. Hal tersebut tentunya menuntut pengelolaan keuangan daerah untuk melaksanakan secara lebih tertib, cermat, tepat, serta mampu memberikan informasi yang memadai tentang kondisi

keuangan daerah, seperti hak dan kewajiban yang dimiliki, aset daerah yang dikelola serta kekayaan daerah yang ada.

Kabupaten Tangerang yang merupakan bagian dari Provinsi Banten adalah daerah yang pada tahun 2015 ini akan menerapkan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Penerapan sistem akuntansi berbasis akrual di pemerintahan daerah menyajikan tantangan baru pada tahun ini, untuk itu agar proses penerapannya dapat berjalan dengan baik perlu dukungan dari sumber daya manusia yang meliputi pembuat dan pengguna informasi keuangan sarana dan prasarana serta sistem informasi yang ada di pemerintahan serta kekuatan dari komitmen organisasi dalam menjalankan penerapan sistem akuntansi berbasis akrual ini. Terkait dengan persiapan tersebut yang dilakukan pemerintah Kabupaten Tangerang agar siap dan dapat mengatasi berbagai kendala dalam penerapan basis akrual. Pemerintahnya berupaya memperkuat Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai aparatur yang berkaitan dengan pengelola keuangan dan barang, terutama para Kepala Dinas atau SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah), dalam upaya implementasi Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis Akrual. Dari sejumlah masalah yang dihadapi, ada dua pokok permasalahan yang dihadapi pemerintahannya untuk menggunakan hal tersebut. Masalahnya yaitu sistem informasi dan sumber daya alam (SDM). Permasalahan pada sistem adalah, sudah tersediaannya Sistem Informasi yang bernama SIMDA yang dipilih sebagai sistem penyusunan laporan keuangan berbasis akrual. Namun kemungkinan terjadinya resiko yang dihadapi jika SDM tidak paham dan kurang memadai untuk menjalankan aplikasi tersebut. Hal menonjol yang terkait dengan kesiapan pemerintah dalam implementasi SAP berbasis akrual selanjutnya, adalah kurangnya sumber daya manusia yang memadai ini disebabkan karena rendahnya kualitas SDM yang diukur dari kemampuan dan pengetahuan dibidangnya. Untuk itu, pihaknya mengupayakan untuk mengumpulkan para kepala dinas/SKPD untuk melakukan sosialisasi dan pelatihan, dengan menghadirkan narasumber dari BPK dan BPKP. Pemerintah juga memerlukan komitmen untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, karena komitmen pengelolaan keuangan oleh seluruh SKPD sangat penting. Dukungan yang kuat dari pimpinan merupakan kunci keberhasilan dari implementasi laporan keuangan berbasis

akrual, karena salah satu penyebab kelemahan penyusunan Laporan Keuangan pada beberapa Kementerian/Lembaga adalah lemahnya komitmen pimpinan satuan kerja. Menurut pendapat Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Banten Sunarto Penerapan sistem basis akrual ini lebih awal cukup beresiko karena dibutuhkan persiapan yang matang, baik dari segi sumber daya manusia hingga aplikasi sistemnya, karena kalau tidak dipersiapkan akan sangat berpengaruh pada opini yang didapatkannya.

Wakil Bupati Bapak Hermansyah, menuntut pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan secara lebih tertib, cermat, tepat dan akurat serta mampu memberikan informasi yang memadai tentang kondisi keuangan daerah. Seperti hak dan kewajiban yang dimiliki, aset daerah yang dikelola serta potensi-potensi kekayaan daerah yang ada. Pemerintah Kabupaten Tangerang dalam hal ini sangat mendukung untuk melaksanakan ketentuan tersebut. Pemerintah Kabupaten Tangerang bertekad untuk senantiasa mempertahankan prestasi terbaiknya dalam hal penyajian Laporan Keuangan yang telah berhasil memperoleh opini WTP dari BPK-RI selama tujuh kali berturut-turut sejak tahun 2008. Pemerintah Kabupaten Tangerang dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Banten melakukan kerjasama pelaksanaan teknis Sistem informasi manajemen daerah (Simda) Keuangan yang merupakan sistem baru pelaksanaan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual.

Beberapa penelitian terdahulu yang membahas mengenai pengaruh sumber daya manusia terhadap kesiapan penerapan SAP berbasis akrual telah dilakukan oleh (Sukadan & Mimba 2015) menunjukkan variabel kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif secara statistik terhadap kesiapan penerapan SAP berbasis akrual. Berbeda dengan (Widiyastuti, dkk 2015) SDM belum sepenuhnya menguasai basis akrual karena terkendala dalam kemampuan SDMnya.

Menurut Hetti (2013) mempengaruhi kesiapan pemerintah daerah dalam implementasi sistem akuntansi basis akrual. Namun menurut (Sugiarto dan Alfian 2014) faktor perangkat pendukung (IT) tidak berpengaruh terhadap keberhasilan penerapan akuntansi berbasis akrual.

Menurut penelitian selanjutnya dilakukan oleh (Arif dkk. 2013) mengenai komitmen, pada prinsipnya mempunyai komitmen untuk menerapkan SAP akrual

yang diatur dalam PP No. 71 Tahun 2010. Namun hasil itu tidak sejalan dengan hasil penelitian pada komitmen organisasi yang dilakukan (Ardiyansyah 2013) bahwa, komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap kesiapan penerapan SAP berbasis akrual.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada metode penelitian, tempat penelitian dan jumlah sampel penelitian. Pada penelitian ini dilakukan di Kabupaten Tangerang dengan sample dari para satuan kerja perangkat daerahnya. Berdasarkan fenomena di atas, peneliti tertarik menganalisis bagaimana kesiapan pemerintah Kabupaten Tangerang untuk mengimplementasikan SAP berbasis akrual dalam penyusunan laporan keuangan. Selanjutnya, penulis melakukan identifikasi kemungkinan kendala yang dihadapi oleh pemerintah Provinsi Banten dalam menerapkan basis akrual. Selain itu, penulis juga akan menguraikan faktor-faktor yang mempengaruhi adanya perubahan standar akuntansi pemerintahan kas menuju akrual menjadi standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Oleh karena itu, judul yang diangkat dalam penelitian ini adalah **“Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesiapan Implementasi SAP Berbasis Akrual di Kabupaten Tangerang (Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010)”**.

## **I.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Apakah Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap kesiapan implementasi SAP Berbasis Akrual?
- b. Apakah Sistem Informasi/IT berpengaruh terhadap kesiapan implementasi SAP Berbasis Akrual?
- c. Apakah Komitmen Organisasi berpengaruh terhadap kesiapan implementasi SAP Berbasis Akrual?

### **I.3 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini, maka penelitian bertujuan:

- a. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh Sumber Daya Manusia terhadap kesiapan implementasi SAP Berbasis Akrua?
- b. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh Sistem Informasi/IT terhadap kesiapan implementasi SAP Berbasis Akrua?
- c. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh Komitmen Organisasi terhadap kesiapan implementasi SAP Berbasis Akrua?

### **I.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak, antara lain :

- a. Manfaat Teoritis  
Memberikan bukti untuk memperkuat hasil penelitian sebelumnya dan menjadi dasar dalam kajian berikutnya serta menambah wawasan dan pengetahuan pembaca dikalangan akademis mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kesiapan implementasi SAP Berbasis Akrua.
- b. Manfaat Praktis
  - 1) Pemerintah Daerah  
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dalam memberikan masukan bagi Pemerintah Pusat maupun Daerah dalam penyusunan kebijakan dimasa yang akan datang.
  - 2) Investor  
Untuk memberikan informasi dan gambaran mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kesiapan implementasi SAP Berbasis Akrua
  - 3) Pihak Lain.  
Bagi pihak lain, penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi dalam penelitian-penelitian selanjutnya yang sejenis khususnya yang berkaitan dengan sumber daya manusia, komitmen organisasi, dan perangkat pendukungnya yang berpengaruh terhadap kesiapan implementasi SAP Berbasis Akrua.